

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Batam masih menghadapi berbagai tantangan meskipun berbagai program pembangunan infrastruktur dasar telah diimplementasikan. Tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan lahan, keterbatasan anggaran, serta ketimpangan antara wilayah mainland dan hinterland dalam hal ketersediaan infrastruktur dasar. Data menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang telah ditangani masih berada pada angka 23,20% dari total kebutuhan yang ada, dengan proporsi alokasi anggaran yang lebih besar berasal dari APBN, APBD Kota Batam, serta program PSPK dan APBD Provinsi Kepulauan Riau.

Secara lebih spesifik, wilayah mainland memiliki tingkat pemenuhan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan hinterland, dengan total panjang infrastruktur yang telah dibangun mencapai 752.219,42 meter di mainland dan hanya 136.046,31 meter di hinterland. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pembangunan antara wilayah perkotaan dan wilayah pesisir, di mana hinterland masih mengalami keterbatasan dalam akses air bersih, sistem drainase yang memadai, serta pengelolaan sampah dan limbah. Hambatan lainnya adalah kepemilikan lahan yang berada di bawah kewenangan BP Batam, sehingga mempersulit pemerintah daerah dalam menentukan lokasi yang tepat untuk

pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan infrastruktur pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pejabat di Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan Kota Batam, disebutkan bahwa pemerintah terus berupaya mencari solusi melalui perencanaan pembangunan yang lebih strategis serta memanfaatkan berbagai sumber pendanaan. "Kami memahami bahwa masalah permukiman kumuh di Batam tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BP Batam dan sektor swasta, untuk memastikan pembangunan yang lebih merata," ungkapnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan ini.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya guna memperdalam pemahaman tentang strategi penanganan permukiman kumuh di Kota Batam.

1. Penguatan Kolaborasi Multi-Pihak: Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi model kerja sama yang lebih efektif antara pemerintah daerah, BP Batam, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya menangani permasalahan permukiman kumuh. Studi ini penting dilakukan karena koordinasi lintas sektor masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan pembangunan di Kota Batam.

2. Evaluasi Kebijakan dan Regulasi yang Berlaku:

Kajian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis efektivitas kebijakan dan regulasi yang telah diterapkan dalam menangani kawasan permukiman kumuh, termasuk program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) serta peran peraturan daerah dalam pengelolaan kawasan permukiman. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan dapat diterapkan secara efektif.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Permukiman:

Peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program perbaikan permukiman kumuh masih perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian mendatang dapat menggali strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dasar, baik melalui pendekatan berbasis komunitas maupun program pemberdayaan sosial-ekonomi.

Melalui penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan inovatif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan permukiman kumuh di Kota Batam.